KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Siap Buka Laporan Kunker
Tanggal : Senin, 16 Mei 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

DPR Siap Buka Laporan Kunker

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap menjawab tantangan publik untuk membuka laporan kunjungan kerja (kunker) atau reses. Hal ini dilakukan guna menjawab pemberitaan tentang potensi kerugian negara sebesar Rp945 miliar lantaran tidak lengkapnya laporan hasil kunker anggota DPR berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita berani-berani saja (buka laporan kunker), tidak ada masalah asalkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang keuangan. Tapi permasalahannya, bukan berani tidak berani, kalau berani, DPR pasti. Masalahnya, penggunaan keuangan negara dan kunjungan kerja bukan hanya DPR saja, tapi eksekutif dan yudikatif juga melakukan hal yang sama," tandas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada *KORAN SINDO* di Jakarta kemarin.

Taufik menyatakan, kunker anggota DPR sudah sesuai dengan aturan Menteri Keuangan (Menkeu). Kunker atau reses DPR sejak zaman Orde Baru (Orba) menggunakan sistem *lump sum* berbasis kinerja kegiatan dan anggota DPR wajib membuat laporan. "Jadi, yang selama ini ada istilah kunker fiktif pernah saya sampaikan ke teman-teman media, tidak betul dan tidak mungkin," tandasnya.

Menurut Taufik, kalaupun ada anggota yang belum melakukan kelengkapan pengisian laporan kegiatan, hal ini menjadi otoritas fraksi masing-masing untuk mengingatkan. Dan apabila masih ada anggota yang bandel dengan hanya mengambil uangnya tapi tidak pergi ke daerah pemilihan (dapil), ada sanksi di masing-masing fraksi. "Dalam hal ini kita (pimpinan DPR) memberikan apresiasi untuk anggota yang melengkapi," paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh sejumlah pimpinan fraksi. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk membuka laporan kunker atau reses semua anggota dari waktu ke waktu ke publik. "Kenapa harus takut? *Alhamdulillah*, laporan anggota Fraksi PKS lengkap dari setiap kunker dan reses," ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Jazuli menyatakan, Fraksi PKS selalu tertib perihal laporan kunker atau reses setiap anggotanya. Sebab, kalau ada laporan yang tidak lengkap, pada reses berikutnya Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tidak akan memberikan uang reses ke anggota. "Kalau tidak lengkap, Setjen tidak kasih uang reses berikutnya," tandasnya.

Menurut dia, yang membuat standar laporan kunker dan reses adalah Kesetjenan DPR. Jadi, yang memeriksa dan memverifikasi apakah laporan itu sesuai dengan standar tentu Kesetjenan DPR pada bagian pelaporan. Untuk Fraksi PKS, laporan-laporan anggota yang sudah diserahkan ke setjen.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto juga menyatakan fraksinya tidak takut untuk menjawab keraguan dan pertanyaan publik mengenai beredarnya rumor kunker fiktif. Fraksi PAN pun siap membuka laporan anggotanya kapan pun kepada publik. "Ya harus berani, toh selama ini Fraksi PAN tertib soal laporan kunker dan reses," tandas ketua DPP PAN ini.

kiswondari